# BAB III

# OBJEK PENELITIAN

## 3.1 Gambaran Umum *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

### 3.1.1 Latar Belakang *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

*United Nations Children's Fund* (UNICEF) didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946. Bermarkas besar di Kota New York, UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi (http://id.wikipedia.org/indonesia/id/unicef - Diunduh 04 November 2009).

Pada awal tahun pembentukannya, sumber-sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak korban perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan dan sandang pangan atau pakaian di Eropa dan Cina. Pada bulan desember 1950, Sidang Umum PBB mengubah mandat organisasi ini untuk menanggapi berbagai kebutuhan yang sangat mendesak dari sekian anak yang tidak terhitung jumlahnya di negara berkembang. Kemudian sekitar akhir tahun 1953, sidang umum memutuskan bahwa UNICEF harus meneruskan tugasnya sebagai badan tetap PBB. Badan ini kemudian disebut the "*United Nations Children's Fund*" (Dana PBB untuk anak-anak).

Menjelang tahun 1965 UNICEF mendapatkan hadiah Nobel bidang Perdamaian yang merupakan pengakuan bahwa kesejahteraan anak pada saat itu tidak terpisahkan dari perdamaian bagi dunia di masa yang akan datang. Mandat UNICEF menginginkan perencanaan program brgeser sampai keluar proyek-proyek sektoral, mengaitkan proses sosial dengan pembangunan umat manusia. UNICEF menanggapi kebutuhan strategis ini pertama-tama dengan perncanaan program di suatu negara (*country programming*) dan kemudian dengan pendekatan pelayanaan oleh dan untuk masyarakat.

Pada tahun 1979, sidang umum memproklamasikan bahwasannya pada tahun tersebut menjadi Tahun Anak Internasional (*International Years of Children*) dan menjadikan UNICEF sebagai badan utama PBB untuk mengkoordinasikan dukungan-dukungan bagi berlangsungnya kegiatan-kegiatan tahun anak internasional yang sebagian besar dilaksanakan pada tingkat nasional. Kemudian pada akhir tahun 1979 sidang umum memberikan UNICEF tanggung jawab untuk menarik perhatian dunia pada kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah umum.yang dihadapi anak-anak baik di negara-negara industri maupun di negara-negara berkembang (Rudy,2009:136).

### 3.1.2 Fungsi *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada dibawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak-anak.
b. Memberi nasehat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
c. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara.
d. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
e. Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.
f. Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan (Sumber: UNICEF,2009).

Sebagai bagian integral dari PBB, UNICEF merupakan organisasi yang bersifat semi otonomi yang memiliki badan pengatur sendiri, yaitu Dewan Eksekutif dan Sekretariat (Rudy,2009:137). Dewan terdiri dari 36 negara anggota yang terdiri dari 8 negara dari Afrika Selatan, 7 negara dari Asia, 4 negara dari Eropa Timur, 12 negara dari Eropa Baarat, 5 negara dari Amerika Latin, dan negara-negara lainnya. Dalam dewan Eksekutif terdapat 5 petugas yaitu Presiden dan 4 Wakil Presiden yang mewakili 5 wilayah regional di PBB dan dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Dewan Eksekutif dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk masa 3 tahun dengan memperhatikan pembagian geografis dan perwakilan negara-negara penyumbang (Sumber:UNICEF,2009).

### 3.1.3 Struktur Organisasi *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

Untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi, UNICEF mempunyai 11 struktur utama organisasi (Data: UNICEF,2009). Adapun kesebelas struktur utama organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Badan Eksekutif**

Badan eksekutif ini terdiri dari 41 anggota dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan untuk masa 3 tahun dan memiliki wewenang:

1. Meninjau pekerjaan dan prospek kerja dari organisasi.
2. Menentukan kebijakan-kebijakan.
3. Memberikan persetujuan pada rencana jangka panjang dan menengah organisasi.
4. Memberikan usul-usul dan membuat komitmen untuk kerjasama dan pembiayaan.
5. Mencatat laporan dari auditor eksternal PBB.
6. Memberi persetujuan pada laporan keuangan.
7. Mengatur dan melaksanakan usaha pencarian dana untuk administrasi dengan program organisasi.

**b. Direktur Eksekutif**

Badan eksekutif ditingkat kantir pusat (New York, Jenewa, Copenbagen, Sidney, dan Tokyo) terdiri dari badan-badan utama yaitu:

1. Kantor Direktur Eksekutif meliputi staff eksekutif, komite manajemen, kantor sekretaris badan eksekutif dan kantor pembukuan internal.
2. Kelompok hubungan eksekutif meliputi kantor dana program, divisi komunikasi dan informasi, penjualan kartu ucapan, dan kantor umum non pemerintah.
3. Kelompok program meliputi divisi perencanaan dan pengembangan, divisi program pelayanan laporan dan unit operasi darurat.
4. Kelompok operasi meliputi divisi pengawasan, divisi personal, divisi suplai dan manajemen serta pembiayaan.

**c. Kantor Direktur Eksekutif**

Merupakan kantor utama yang bertanggung jawab terhadap semua tujuan dan aktivitas *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Tugas kantor ini adalah mengkoordinir dan meninjau kebijakan-kebijakan serta kemajuan yang telah dicapai oleh UNCEF melalui program-programnya.

**d. Kantor Sekertaris Badan Eksekutif**

Mengusahakan adanya hubungan efektif antara badan eksekutif dan sekretariat UNICEF, juga antara anggota dengan badan-badan PBB yang lainnya.

Adapun tugas dari kantor sekrtetaris badan eksekutif adalah sebagai berikut:

1. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan rekomendasi dari direktur kepada badan eksekutif.
2. Mempersiapkan berbagai kegiatan dan rapat-rapat.
3. Mengorganisir rapat-rapat dan segala keperluan badan eksekutif.

4. Mempersiapkan pelayanan editorial dan teknik untuk laporan-laporan serta pembuatan dokumen.
5. Berkonsultasi dengan para pejabat dan anggota dari badan eksekutif yang mewakili pemerintah dan bekerja untuk UNICEF.
6. Mengusahakan rekaman yang permanen dari perundingan keputusan badan eksekutif.

**e. Kantor Pemeriksa Keuangan Internal**

Berfungsi untuk menyalurkan dan memeriksa penggunaan keuangan UNICEF. Bergerak dalam bidang manajemen informasi untuk sistem kontrol internasional dan untuk meningkatkan kegiatan operasional dengan membuat pembukuan keuangan, program, dan tugas-tugas lainnya. Pembukuan internasional bersifat independen dan laporan diberikan langsung kepada Dewan Eksekutif.

**f. Kelompok Hubungan Eksternal**

Bertugas membantu dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF termasukhubungan dengan pemerintah, NGOs, badan-badan PBB yang lain serta masyarakat umum. Kelompok hubungan eksternal juga memiliki kantor dana program yang memiliki wewenang serta tanggung jawab yaitu:

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan sekertaris yang berhubungan dengan permohonan bantuan keuangan sampai kepada jaminan pembayaran untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah (negara anggota), PBB dan badan lainnya.

2. Menjalankan hubungan erat dengan pemerintah (negara anggota), para pengamat, misi-misi permanen dan komisi-komisi di lapangan.

**g. Kelompok Program**

Kelompok Program bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan program-program UNICEF. Kelompok Program memiliki divisi program mengembangkan dan perencanaan yang memiliki tujuan:

1. Memberi saran kepada pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok professional.
2. Meningkatkan partisipasi UNICEF dalam program-program dengan cara memperluas serta meningkatkan bantuan teknik terhadapkeseluruhan jaringan program-program UNICEF yang utama.
3. Meningkatkan kegiatan program dan penyuluhan untuk kepentingan anak-anak dengan cara melakukan evaluasi terhadap program-programnya.

**h. Kantor Regional**

Adapun tugas tetap dari Kantor Regional ini adalah:

1. Menjadi perantara dan sarana komunikasi antara kantor lapangan dengan kantor pusat.
2. Bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarluaskan informasi kesemua wilayah yang mungkin untuk menerima pelayanan dan penerapan program UNICEF dan mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan permintaan dari kantor perwkilan disetiap negara.

**i. Kelompok Operasional**

Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, manajemen dan administrasi financial. Tugas-tugas kelompok operasional ini antara lain:

1. Membuat strategi perencanaan sumber daya UNICEF.
2. Mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam hal keuangan.
3. Memberikan dukungan staf organisasi dalam menjalankan tugasnya.
4. Mengadakan latihan-latihan bagi anggota.
5. Memberikan informasi dan nasehat bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, kelompok Kelompok Operasional membawahi divisi manajemen finansial, informasi, suplai, sumber daya manusia, manajemen dan administratif.

**j. Badan-badan pendukung lainnya**

Berupa kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang berperan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baik tentang kebutuhan anak-anak di negara berkembang.

**k. Staf Organisasi *United Nations Children's Fund* (UNICEF)**

Yang terakhir adalah staf anggota UNICEF yang berada ditiap negara anggota diseluruh dunia. UNICEF memiliki lebih dari 7000 staf yang bekerja memperjuangkan hak-hak anak di seluruh penjuru dunia (Sumber:UNICEF,2009).

### 3.1.4 Sumber Dana *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

#### 3.1.4.1 Sumber Dana Umum

Sumber dana UNICEF secara keseluruhan terdiri dari sumber dana umum dan sumber dana khusus. Pendapatan UNICEF merupakan sumbangan-sumbangan dari pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan semua itu termasuk kedalam sumber-sumber dana umum UNICEF. Meski sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNICEF bakan merupakan organisasi "anggota" dengan suatu anggaran yang "dinilai". Namun demikian hampir semua negara, baik negara industri maupun negara berkembang memberikan sumbangan tahunan yang secara keseluruhan merupakan kurang lebih tiga perempat dari pemasukan UNICEF (Rudy,2009:139).

#### 3.1.4.2 Sumber Dana Khusus

Selain sumber dana umum, perorangan dan organisasi-organisasi diseluruh dunia juga merupakan sumber pendanaan khusus yang penting, dan bagi UNICEF mereka merupakan nilai yang jauh lebih besar dari jumlah sumbangan yang mereka berikan. Dukungan dana masyarakat datang dari penjualan kartu ucapan, sumbangan perorangan, penghasilan dari peristiwa dan kegiatan amal, mulai dari konser sampai pertandingan sepak bola; peristiwa-peristiwa dunia seperti *sport aid* dan *forth run*; bantuan-bantuan hibah dari organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga; dan pengumpulan dana yang dilakukan anak-anak sekolah.

Usaha-usaha pengumpulan dana seperti itu sering disponsori komite-komite nasional. UNICEF terus meningkatkan pendanaan baik dari para donor tradisional maipun dari sumber-sumber potensial lainnya. Walaupun sumber-sumber keuangan sederhana sifatnya, UNICEF merupakan salah satu dari sumber-sumber kerjasama yang paling besar dalam pelayanan program-program yang bermanfaat untuk anak-anak di negara-negara berkembang.

### 3.1.5 Hubungan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dengan United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF berada di bawah Majelis Umum. Majelis Umum merupakan badan tertinggi dalam PBB dan mempunyai kewenangan untuk membuat usulan penyelidikan dan pengajuan rekomendasi yang bertujuan untuk:

1. Memajukan kerjasama internasional di lapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional.
2. Memajukan kerjasama interasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta membantu pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, dan bahasa.

Selain itu Majelis Umum juga dapat membentuk organ-organ yang dianggap perlu dalam melaksankan pranannya, dan salah satunya yaitu UNICEF. UNICEF adalah salah satu organisasi internasional PBB yang berada dibawah kerjasama

Majelis Umum dan *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). UNICEF wajib melaporkan program-programnya kepada ECOSOC, yang kemudian akan melaporkannya kepada Majelis Umum. Dalam mengatasi masalah anak-anak di dunia, UNICEF membutuhkan kerjasama dengan badan-badan lainnya yang ada dalam sistem PBB, serta dukungan dari badan-badan khusus.

UNICEF dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di dunia telah menjalankan kerjasama diantaranya dengan *United Nations Educational, Scientific and Cultuural Organisation* (UNESCO), *World Health Organisation* (WHO), *Food and Agriculture Organisation* (FAO), *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), dan *United Nations Population Fund* (UNFPA).

### 3.1.6 Mitra Kerja *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

Dalam melaksanakan tugasnya, tentunya UNICEF tidaklah bekerja sendiri. UNICEF memiliki beberapa mitra kerja dalam menjalankan tugasnya, yang diantaranya adalah:

#### 3.1.6.1 Negara-negara Berkembang

Kerjasama UNICEF disusun bersama dengan pemerintah negara yng melaksanakan dan bertanggung jawab atas program, baik secara langsung atau melalui organisasi yang digunakan. Dukungan yang relatif lebih besar diberikan kepada program-program yang menguntungkan bagi anak-anak dari negara-negara yang paling kurang berkembang.

Saluran-saluran kerjasama mencakup serangkaian departemen sektoral. Koordinasi antar departemen dan pendekatan antar disiplin ilmu sungguh penting untuk keberhasilan kerjasama, karena pada tingkat masyarakat masalah yang akan ditanggapi sering merupakan gabungan dari sejumlah factor yang mencakup kewenangan teknis dan beberapa departemen. Upaya-upaya dalam suatu sector biasa gagal tanpa usaha serupa oleh sector lain. Lebih lagi, perspektif sktoral yang sempit bisa mengimbangi kekuatan teknis dari pembuatan program dengan dukungan masyarakat.

### 3.1.6.2 Komite-komite Nasional

Komite-komite nasional untuk UNICEF, yang sebagian besar dibentuk di negara-negara industri, memainkan peranan yang sangat penting dalam menciptakan suatu pengertian yang lebih mendalam tentang pekerjaan UNICEF. Komite-komite yang dewasa ini berjumlah 34, yang berkepentingan dengan peningkatan dukungan untuk UNICEF, dari segi keuangan, melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan dana dan penjualan kartu ucapan. Peningkatan dukungan ini juga dilakukan melakukan promotif, pendidikan dan informasi.

### 3.1.6.3 Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat

UNICEF selalu bekerjasama secara erat dengan sektor sukarela. Banyak dari lembaga swadaya masyarakat internasional, antara lain lembaga-lembaga professional, bantuan pembangunan, pelayanan, agama, pengusaha dan pekerja telah

menjadi mitra-mitra kerja UNICEF dengan menyediakan saluran-saluran untuk dukungan promotif yang ditargetkan dengan mengumpulkan dana secara langsung melibatkan diri dalam program. Hubungan pada tingkat global/dunia meningkatkan, dan pada gilirannya dibantu oleh interaksi dalam bidang yang mengusahakan tujuan bersama.

### 3.1.6.4 Badan-badan PBB

Penyusunan program UNICEF yang sifatnya antar-disiplin ilmu ini menghendaki kerjasama dalam system PBB, sama halnya seperti apa yang dihendaki dalam koordinasi antar departemen di suatu pemerintahan. Kerjasama yang dilakukan tersebut seperti pertukaran keahlian tingkat negara sampai pertukaran-pertukaran kebijaksanaan dan pengalaman yang sistematis. Pertukaran-pertukaran ini terjadi melalui mekanisme Komite Administrasi untuk Koordinasi (ACC), dan melalui konsultasi-konsultasi antar secretariat secara berkala.

Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan secara teratur, misalnya dengan Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO), Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Program Pangan Sedunia (WFP), dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Badan-badan itu juga membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dalam Komite Konsultasi mengenai Program dan Kebijaksanaan untuk anak. UNICEF tidak meniru pelayanan-pelayanan yang tersedia dari badan-badan khusus PBB tersebut, tetapi memanfaatkan nasihat teknis yang mereka berikan (Rudy,2009:140-142).

### 3.1.7 Program *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Secara Universal

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional bagi kesejahteraan anak-anak, tentunya UNICEF memiliki program-program khusus yang ditujukan bagi seluruh anggotanya. Program-program tersebut diantaranya:

1. **Child Survival And Development (**Program untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak**)**

   Pada tahun 2007, diperkirakan 9.200.000 anak-anak di seluruh dunia di bawah usia lima tahun meninggal karena tidak adanya pencegahan dini. Beberapa diantaranya disebabkan oleh penyakit seperti pneumonia, diare dan malaria.

   UNICEF memiliki Rencana Strategis Jangka Menengah untuk 2006-2009 untuk menjaga kelangsungan hidup pada anak-anak dan perkembangannya. UNICEF bekerjasama dengan pemerintah, lembaga-lembaga nasional dan internasional, dan masyarakat sipil untuk mendukung tindakan-tindakan efektif dan penting di setiap tahapan siklus hidup anak / masa-masa perkembangan anak, diantaranya dalam masa kehamilan ibu, anak usia dini, prasekolah dan sekolah, dan pada masa remaja (http://www.unicef.org/childsurvival/index.html - Di unduh 26 Juni 2010).

2. **Basic Education And Gender Equality** (Program pendidikan dan kesetaraan gender)

   Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan setiap anak di dunia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini penting untuk perkembangan setiap individu dan masyarakat, guna membuka jalan untuk masa

depan yang sukses dan produktif. UNICEF memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan, memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas, tidak adanya pembeda-bedaan gender. Hal tersebut dilakukan agar setiap negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas guna meningkatkan pembangunan negara-negara di seluruh dunia (http://www.unicef.org/girlseducation/index.php - Di unduh 26 Juni 2010).

3. **Children and HIV-AIDS** (Peanggulangan HIV-AIDS anak-anak)

Pada tahun 2008, 730.000 anak di bawah usia 15 tahun diperkirakan terkena HIV dan sangat membutuhkan dukungan moral. Jutaan anak-anak hidup dalam masyarakat dengan rasa terbebani atas penyakit yang dideritanya. Tanpa dukungan yang tepat, banyak anak-anak ini mungkin mengalami drop-out dari sekolahnya, penghinaan atau bahkan kematian dini.

Menyadari hal ini, UNICEF telah menempatkan HIV sebagai prioritas. UNICEF mengkampanyekan untuk bersatu melawan HIV/AIDS. Kampanye ini, sejalan dengan prioritas UNICEF untuk memenuhi Millenium Development Goal 6. Setiap tahunnya, UNICEF mengambil langkah-angkah yang tepat dalam pencegahan, pengujian, perawatan dan dukungan bagi anak-anak yang terkena dampak HIV/AIDS (http://www.unicef.org/aids/index.php - Di unduh 26 Juni 2010).

4. **Child Protection From Violence, Exploitation And Abuse** (Program perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual)

Jutaan anak-anak di seluruh dunia mengalami kekerasan, eksploitasi, pelecehan, perkawinan di usia dini, hidup dalam konflik bersenjata di negaranya, dan bahkan praktek-praktek berbahaya seperti mutilasi genital perempuan / pemotongan. Semua itu terjadi tanpa adanya perlindungan yang memadai.

UNICEF mendukung terciptanya lingkungan yang protektif bagi anak-anak dalam kemitraan dengan pemerintah, mitra-mitra nasional dan internasional termasuk sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sistem nasional perlindungan anak, praktek-praktek sosial pelindung dan pemberdayaan anak-anak sendiri disertai dengan pengawasan dan pemantauan yang secara terus-menerus antara unsur-unsur lingkungan yang protektif dan memungkinkan negara, masyarakat dan keluarga untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan terhadap anak-anak (http://www.unicef.org/ protection/index.html - Di unduh 26 Juni 2010).

5. **Policy advocacy and partnerships for children's rights** (Kebijakan advokasi dan kemitraan untuk hak-hak anak)

UNICEF berfokus pada dampak sosial dan ekonomi terhadap anak-anak. Menganalisis berbaai kebijakan merupakan aspek penting dari kinerja UNICEF dengan pemerintah, pembuat hukum, media, masyarakat sipil dan organisasi internasional yang berkaitan dengan kesejahteraan anak-anak dan perempuan. Dengan menganalisis ekonomi, kebijakan sosial dan hukum, UNICEF dapat lebih memahami keadaan dan kekuatan yang mempengaruhi kesejahteraan anak-

anak dan wanita di seluruh dunia (http://www.unicef.org/ policyanalysis/index.html - Di unduh 26 Juni 2010).

### 3.1.8 Prioritas *United Nations Children's Fund* (UNICEF)

Yang menjadi prioritas dari UNICEF adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan anak dan wanita serta pencegahan dini dari penyakit

Kegiatan ini mencakup kunjungan rumah oleh staf lapangan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat desa serta perkotaan untuk meningkatkan sistem perawatan yang baik dan benar.

2. Program Pendidikan

Program ini berfokus terhadap penanggulangan masalah yang mengakibatkan hambatan pada akses pendidikan, tingkat drop out yang tinggi serta merugikan sistem pendidikan. Program ini berfokus pada kesiapan anak menerima pendidikan formal, menguatkan otonomi sekolah serta sumber daya setempat dan meningkatkan kapasitas komite sekolah untuk lebih berperan dalam proses pendidikan. program ini juga mencakup penyediaan pendidikan *life skill* (PLS) bagi wanita dan anak putus sekolah serta pendidikan non formal.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan anak ini terdiri dari perlindungan anak terhadap diskriminasi, kekerasan, ekploitasi serta penelantaraan anak baik di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan perhatian khusus pada anak perempuan. Masalah yang disorot anatara lain, eksploitasi seks komersil, penjualan dan penyelundupan anak, kekerasan

pada anak, anak jalanan, pencatatan kelahiran serta Lembaga Pengadilan UNICEF membantu menguatkan kapasitas Lembaga Perlindungan Anak pusat dan Provinsi serta mendukung reformasi hukum dan penerapan hukum (UNICEF Indoneia, 2009).

### 3.2 *United Nations Children's Fund* (UNICEF) di Indonesia

UNICEF mulai masuk ke Indonesia pertama kali pada 1948. Kerjasama resmi antara UNICEF dan pemerintah Indonesia dijalin pertama kali pada 1950. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh nusantara. Prioritas awal UNICEF adalah memberikan pelayanan dan persediaan yang sangat diperlukan untuk memperbaiki kesehatan anak Indonesia dan keluarganya (http://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html - Di unduh 04 November 2009).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia, program kerjasama UNICEF juga bergeser dari pengadaan bahan bantuan dan pelayanan kesehatan ke kegiatan yang difokuskan pada pergerakan sumber daya masyarakat, keluarga dan perorangan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prilaku dan kebiasan yang penting bagi kesejahteraan dan perkembangan mereka sehingga hal-hal itu dapat mereka terima.

*United Nations Children's Fund* (UNICEF) telah banyak belajar dari pengalaman bahwa perawatan kesehatan, gizi, pendidikan dasar, perlindungan anak, air dan sanitasi adalah bidang-bidang dimana perbaikan yang dilakukan dapat

berpengaruh sangat bear terhadap kesejahteraan anak secara menyeluruh. Tahun 1998 terjadi lebih dari 250.000 kematian setiap harinya akibat penyakit yang harusnya dapat dicegah dan sekitar 40% dari seluruh balita atau sembilan juta masih menderita kekurangan gizi. UNICEF pada tahun 1990 juga berupaya mengatasi kesenjangan keadaan anak-anak di berbagai provinsi. Angka rata-rata kematian bayi di Indonesia sebanyak 58 jiwa per seribu kelahiran. Jumlah wanita yang meninggal akibat kehamilan dan persalinan adalah sebesar 390 jiwa per 100.000 kelahiran. Angka rata-rata nasional tersebut merupakan yang tertinggi di ASEAN.

UNICEF menjawab tantangan-tantangan ini dengan menempakan kantor-kantor perwaklian di 9 (sembilan) provinsi sehingga memungkinkan kerjasama yang lebih dekat dengan pemerintah daerah. Staf UNICEF di kantor-kantor perwakilan daerah terdiri dari staf internasional maupun nasional yang memahami bahasa dan budaya serta keadaan anak-anak setempat dan keluarga mereka (UNICEF Indoneia, 2009).

Kronologis Sejarah *United Nations Children's Fund* **(**UNICEF) di Indonesia dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 3.1**

**Kronologi Sejarah UNICEF di Indonesia**

| Tahun | Kejadian / Kegiatan |
|---|---|
| 1948 | Pertama kali UNICEF memberikan bantuan darurat ke Indonesia untuk mencegah kelaparan karena kekeringan hebat di pulau Lombok. |
| 1949 | Kerjasama resmi terjalin dengan Republik Indonesia dengan |

| | |
|---|---|
| | membangun dapur susu di Yogyakarta, sebagai pusat pemerintahan baru. |
| 1950 | Kesepakatan resmi ditandatangani pertama antara UNICEF dan pemerintah Indonesia yang mencakup pengembangan Program Kesehatan Ibu dan Anak (MCH – Maternal and Childhood Health) dan Program Pengawasan Framboesia atau Patek. Dr.J. Nirula, dokter hewan berkebangsaan India, ditunjuk sebagai kepala perwakilan UNICEF Indonesia pertama. |
| 1961 | Program Layanan Sosial merupakan awal kerjasama dengan Departemen Sosial untuk melatih para pengasuh panti asuhan. Lalu dalam perkembangannya program ini mencakup bantuan pada Kursus Pelatihan Kesejahteraan Sosial bagi para pekerja sosial pemerintah. |
| 1962 | Program pendidikan didirikan dengan fokus pada perkembangan kualitas guru-guru sekolah dasar. Program ini juga mencakup komponen luar sekolah yang disebut Pendidikan Hidup Keluarga. Kelak program ini menjadi Program Kesejaheraan Keluarga Indonesia. |
| 1964 | Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. |
| 1965 | UNICEF menutup kantor perwakilannya setelah Indonesia keluar dari PBB, dan pemerintah Indonesia menghentikan perjanjian kerjasama sebelumnya dengan UNICEF. |
| 1966 | Indonesia bergabung kembali dengan PBB dan UNICEF membuka kembali kantornya di Indonesia tepatnya di Jakarta. |
| 1967 - 1969 | Pemerintah Indonesia pertama kali meluncurkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun pertama (Replita I). Sebagai bagian dari Rencana Utama mencakup Program Pemenuhan Air Pedesaan yang dibangun dengan bantuan UNICEF dan WHO. |
| 1974 | Rencana pembangunan lima tahun II dimulai. UNICEF pada periode ini berfokus pada perbaikan perencanaan dan pemberian layanan kepada |

| | |
|---|---|
| | anak-anak. Pemerintah memiliki 10 bidang yang akan dibantu UNICEF. |
| 1979 - 1982 | Rencana pembangunan lima tahun ketiga di Indonesia diluncurkan. UNICEF memberikan bantuan dalam pengembangan melalui program-program seperti Perbaikan Kesehatan Masyarakat Desa, Kesehatan Ibu dan Anak, ekolah Kesehatan, Gizi, Imunisasi dan Kebersihan Lingkungan dan Air. |
| 1983 - 1989 | UNICEF membantu 1.300 kelompok belajar erta lebih dari 40.000 wanita di lima provinsi dalam rangka membantu strategi pemerintah Indonesia untuk memberantas buta huruf terutama di kalangan para wanita. Rencana Induk Operasi untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak di Indonesia ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan UNICEF. |
| 1990 | Pemerintah Indonesia berkolaburasi dengan UNICEF dalam proyek-proyek pembangunan di bidang pemberantasan buta aksara bagi wanita, partisipasi angkatan kerja perempuan, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk dan rasio usia ketergantungan. |
| 1995 - 2000 | Selama Replita VI, kerjasama pemerintah Indonesia dan UNICEF telah mencakup 65% dari seluruh penduduk Indonesia, terutama para ibu dan anak-anak serta desa-desa yang termasuk di dalam program pengentasan kemiskinan secara nasional. |
| 2006 - 2010 | Indonesia dan UNICEF menandatangani perjanjian kerjasama baru untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun mendatang. Yang terfokus pada program Pendidikan, Kesehatan, Air dan Sanitasi, Memerangi HIV/AIDS, serta Perlindungan anak dan Keadaan Darurat. |

Sumber: UNICEF,2009

### 3.2.1 Program-Program UNICEF di Indonesia

*United Nations Children's Fund* (UNICEF) telah membantu Indonesia sejak

tahun 1950 untuk memenuhi kebutuhan pokok anak-anak. Tujuan pokok kerjasama pemerintah Indonesia dengan UNICEF adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan pengembangan anak-anak dengan perhatian khusus pada percepatan penurunan tingkat sakit dan kematian bayi, anak-anak dan wanita.

Seiring dengan waktu keberadaan UNICEF di Indonesia, UNICEF mulai mengembangkan bantuan dan aktifitasnya bukan hanya sekedar bantuan untuk menanggulangi tingkat sakit dan kematian bayi, anak-anak dan wanita saja.

Di saat ini, program kerjasama antara UNICEF dan Indonesia berlangsung pada tahun 2006 hingga tahun 2010, yang kerangka kerjasamanya ditandatangani pada tanggal 27 januari 2006 di Jakarta yang dilakukan oleh H. Paskah Suzzetta (kepala BAPPENAS) sebagai perwakilan Indonesia dan Gianfranco Rotigliano (Kepala UNICEF Indonesia) sebagai perwakilan dari UNICEF (Program Kerjasama UNICEF-RI, 2006).

Lima program telah disepakati dan ditetapkan bagi kerjasama pemerintah Indonesia dan UNICEF, yaitu sebagai berikut:

1. Program Kesehatan dan Gizi;
2. Program Air dan Sanitasi Lingkungan;
3. Program Pendidikan;
4. Program Penanggulangan HIV/AIDS; dan
5. Program Perlindungan Anak.

*Basic Cooperation Agreement* (BCA) yang disepakati pada tanggal 17 November 1966 merupakan dasar dari kerjasama antara pemerintah RI dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF). Rencana Program Kerjasama (Country Programme Action Plan) periode 2006-2010 akan dilaksanakan sesuai dengan *Basic Cooperation Agreement* (BCA). Program-program dan proyek-proyek yang akan dijalankan tersebut telah disepakati oleh pemerintah RI dan UNICEF (DEPDIKNAS, 2006:1).

Program kerjasama ini telah menetapkan visi dan strategi utama yang akan digunakan sebagai panduan bagi pelaksanaan program kerjasama 2006-2010. Program kerjasama ini sejalan dengan komitmen lembaga PBB di Indonesia – sebagaimana dijabarkan dalam *United Nations Development Assistance Framework* (UNDAF) 2006-2010, yaitu untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Program kerjasama ini akan mendukung pemerintah dalam mewujudkan hak-hak anak dan mempercepat pencapaian tujuan dan target Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) dan MDG di tahun 2015.

Program kerjasama ini diharapkan meningkatkan kesempatan mendapatkan pendidikan seluruh anak-anak, meningkatnya status kesehatan dan gizi, dan menurunnya indens HIV/AIDS dengan pemerintah Indonesia – UNICEF sebagai pemeran utama untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

Program kerjasama ini juaga tidak bisa dipisahkan dari Rencana Strategis Jangka Menengah (MTSP) 2006-2009, yakni rencana yang menggambarkan misi dan mandat organisasi untuk menanggapi perkembangan internasional dan berbagai

perubahan yang berpengaruh terhadap anak dan perempuan, serta pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam konteks internasional dan dalam tubuh PBB sendiri (DEPDIKNAS,2006:5,6).

#### 3.2.1.1 Sekilas tentang kelima program

**1. Program Kesehatan dan Gizi**

Dalam mencapai target MDG, Indonesia telah berhasil mengurangi angka kematian bayi dan balita, namun masih tertinggal dalam penurunan kekurangan gizi anak dan perbaikan kesehatan ibu. Setengah dari kematian bayi terjadi pada minggu pertama kehidupannya, yang memperlihatkan lemahnya status pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia, dimana satu dari empat kelahiran masih dibantu oleh tenaga tradisional. Tingkat kekurangan gizi mikro termasuk yodium, vitamin dan zat besi masih banyak; 58 juta penduduk Indonesia tidak mengkonsumsi garam beryodium dan 70 persen perempuan dan anak-anak menderita anemia.

UNICEF adalah satu-satunya lembaga multilateral dengan tingkat keberadaan di lapangan yang cukup luas di Indonesia, dengan proyek-proyek kesehatan dan gizi yang difokuskan pada penduduk miskin di daerah pedesaan. Dengan demikian UNICEF memiliki status yang unik diantara mitra-mitra pembangunau, baik sumber bantuan teknis internasional dan sumber advokasi dalam bidang kesehatan anak, maupun sebagai mitra ditingkat bawah dalam pelakanaan program dan inovasi di seluruh negeri. Dalam program ini, UNICEF bekerjasama dengan direktorat-direktorat Departemen Kesehatan.

**2. Program Air dan Sanitasi Lingkungan**

Program Air dan Sanitasi Lingkungan merupakan program baru dalam kerjasama Indonesia-UNICEF tahun 2006-2010, terutama setelah terjadinya bencana tsunami. Dalam program ini akan membantu pemerintah dalam mengembangkan strategi dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam air bersih dan sanitasi; meningkatkan proses perencanaan termasuk sumber-sumber pendanaan alternatf, serta meningkatkan sistem monitoring dan database.

UNICEF masih akan memainkan peranan penting sebagai coordinator dalam sektor air bersih dan sanitasi lingkungan untuk korban tsunami, mengembangkan kerangka kemitraan guna menggalang kemampuan dan sumber daya.

**3. Program Pendidikan**

Program pendidikan bertujuan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kualitas pendidikan dan peningkatan akses pada pendidikan menengah. Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini menyangkut kualitas pendidikan, termasuk kualifikasi guru, efektifitas metode pengajaran, manajemen sekolah, dan keterlibatan masyarakat. Selain itu sebagian besar anak umur 3-6 tahun tidak mendapatkan akses pembelajaran sejak usia dini, terutama anak-anak yang tinggal di desa-desa terpencil.

Masalah dalam program pendidikan berkaitan dengan adanya disparitas akses dan kualitas pendidikan pra-sekolah dan pendidikan dasar. Untuk itu Rancangan Program Pendidikan disesuaikan dengan *Rencana Strategis Pendidikan Dasar Indonesia 2005-2009.*

Program pendidikan akan menggabungkan peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui memfokuskan pada akses dengan pemberian pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas. Hal ini menuntut peningkatan manajemen, kemampuan perencanaan dan pengawasan, dengan fokus utama pada sekolah, kelompok dan kabupaten dalam sitem pendidikan dasar yang desentralisasi. Mitra utama program pendidiakan adalah Departemen Pendidikan, Bappenas, Departemen Agama, dan kantor-kantor dinas di propinsi dan kabupaten.

**4. Program Penanggulangan HIV/AIDS**

Program Penanggulangan HIV/AIDS diarahkan pada pencegahan peningkatan wabah HIV/AIDS di seluruh Indonesia. Penularan terutama melalui pengguna napza suntik dan pekerja seks komersial, dan ini menyebabkan pemuda Indonesia berada dalam resiko penularan.

Program penanggulangan HIV/AIDS diarahkan pada usaha untuk mencegah dan mengurangi penyebaran HIV dikalangan para pemuda dan wanita hamil, serta dukungan dan perawatan bagi anak-anak yang rentan terhadap HIV/AIDS. Program HIV/AIDS sejalan dengan *Strategi HIV/AIDS Nasional* 2003-2007 Pemerintah Indonesia dan komitmen internasional untuk mengurangi penyebab HIV/AIDS sampai separuhnya di tahun 2015.

**5. Program Perlindungan Anak**

Program perlindungan anak ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan, kekerasan, dan eksploitasi anak. Sekitar 60 persen anak balita tidak memiliki akte kelahiran, lebih dari 3 juta anak bekerja

dilingkungan berbahaya, sepertiga dari pekerja seks adalah anak-anak berumur dibawah 18 tahun, sekitar 100.000 perempuan diperdagangkan setiap tahunnya, sekitar 5000 anak berada di tahanan atau penjara.

UNICEF merupakan lembaga yang khusus dalam perlindungan anak diantara lembaga-lembaga internasional. Program perlindungan anak secara langsung memberikan kontribusi pada capaian akhir UNDAF, yakni "Perlindungan bagi yang paling rentan dari Perlakuan salah, eksploitasi dan diskriminasi". UNICEF bekerjasama dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan, pengembangan data dan riset, pengembangan dan implementasi peraturan, peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi yang terkait dengan perlindungan anak termasuk di daerah konflik dan terkena bencana (Sumber: Prog Kerjasama UNICEF-RI,2006).

### 3.3 Gambaran Situasi Pendidikan Dasar di Jawa Barat

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, pendidikan dasar di Indonesia secara umum dan khususnya di Provinsi Jawa Barat telah mengalami beberapa kemajuan, walaupun masih belum sepenuhnya mengalami kemajuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Di hampir semua kabupaten / kota di Provinsi Jawa Barat sudah dibangun sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat, dan sistem pembinaan profesional guru melalui gugus sekolah telah berjalan dengan cukup baik. Dan secara perlahan hal ini telah mencerminkan peningkatan pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat.

Selain hal tersebut, kemajuan / perkembangan pendidikan dasar di Jawa Barat juga dapat dilihat juga melalui berbagai hal yang menggambarkan kondisi pendidikan dasar pada saat ini, antara lain pada aspek peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar, serta peningkatan mutu pendidikan dasar.

Salah satu kemajuan pendidikan dasar di Jawa Barat lainnya, ditandai dengan pertambahan / peningkatan jumlah sekolah, murid, dan guru di beberapa Kabupaten / Kota. Berikut ini adalah gambaran peningkatan hal tersebut di 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Jawa Barat yang menjadi daerah kerjasama antara Pemerintah Jawa Barat dengan UNICEF:

**Tabel 3.2**

**Perbandingan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat di tahun 2005 dan 2009**

| Kabupaten / Kota | 2005 | | | 2009 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sekolah | Murid | Guru | Sekolah | Murid | Guru |
| Kab. Indramayu | 865 | 195.068 | 6.508 | 887 | 195.397 | 8.119 |
| Kab. Subang | 879 | 153.352 | 6.903 | 882 | 161.027 | 8.789 |
| Kab. Sukabumi | 1173 | 255.049 | 7.405 | 1178 | 270.434 | 10/490 |
| Kab. Garut | 1516 | 303.507 | 10.819 | 1531 | 333.469 | 14.406 |
| Kota Citebon | 154 | 38.271 | 1.323 | 156 | 38.595 | 1.950 |

Sumber: BPS JABAR, 2009:99,102

**Tabel 3.3**

**Perbandingan Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat di tahun 2005 dan 2009**

| Kabupaten / Kota | 2005 | | | 2009 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sekolah | Murid | Guru | Sekolah | Murid | Guru |
| Kab. Indramayu | 114 | 47.631 | 2.541 | 143 | 64.010 | 3306 |
| Kab. Subang | 75 | 44.482 | 1.201 | 98 | 56.241 | 2371 |
| Kab. Sukabumi | 134 | 46.145 | 2.705 | 158 | 75.758 | 3799 |
| Kab. Garut | 139 | 65.280 | 3.464 | 175 | 85.417 | 6169 |
| Kota Citebon | 41 | 16.264 | 969 | 42 | 17.725 | 1094 |

Sumber: BPS JABAR, 2009:100,103

Dari data ke 2 (dua) tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi kemajuan dalam jumlah sekolah, murid dan guru. Dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kemajuan pendidikan dasar di Provinsi Jawa Barat.

Pembangunan pendidikan dasar di Jawa Barat ini telah dilakukan dengan berbagai upaya telah mencapai tahap yang cukup berarti untuk menghadapi berbagai masalah yang dihadapi. Secara garis besar, yang menjadi masalah pendidikan dasar di Jawa Barat adalah pengelolaan pendidikan bersifat sentralistik dan kurangnya perhatian pada output pendidikan.

Masalah-masalah tersebut diupayakan untuk diatasi dengan berbagai metode tertentu, salah satunya dengan pembuatan program-program pendidikan dasar dan

kerjasama dengan berbagai instansi, organisasi yang regional dan bahkan dengan organisasi internasional. Hal tersebut diupayakan untuk mengatasi masalah yang ada guna mencapai pendidikan dasar yang bermutu.

Pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia, yang akan memberikan sumbangan kepada pengembangan ekonomi, sosial dan politik suatu negara. Dampak pendidikan beraneka ragam dan mempengaruhi hamper semua aspek kehidupan. Banyak negara maju yang kurang memiliki sumber daya alam tetapi telah mencapai tingkat pembangunan yang relative tinggi berkat sumber daya manusia yang berkualtas tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menjelang runtuhnya Pemerintahan Orde Baru pada pertengahan bulan Mei 1998 dan krisis ekonomi yang mulai pada tahun 1997, perbaikan bidang pendidikan telah tercapai secara nyata. Dalam hal pendidikan dasar, Indonesia menganut kebijakan wajib belajar 6 tahun pada tahun 1984. Setelah Indonesia berpartisipasi dalam konffrensi dunia tentang pendidikan dasar untuk semua (*Education for All* / EFA) pada tahun 1990, maka pemerintah mencanangkan sebuah kampanye di tahun 1994 untuk pencapaian universal wajib belajar 9 tahun. Program ini dimaksudkan untuk dirampungkan dalam waktu 10 tahun, namun prakarsa tersebut terancam oleh dampak krisis ekonomi dan masa pemulihannya yang tidak kunjung berakhir.

Meskipun telah diupayakan selama satu dasawarsa, namun sebagian besar anak tidak dapat menyelesaikan atau bahkan tidak terdaftar di Sekolah Dasar (SD). Ini merupakan masalah utama yang mungkin tidak tercermin dalam angka statistik resmi, dan sulit dijangkau akibat kurangnya sumber daya, kemiskinan dan masalah

geografis. Anak usia 7 hingga 15 tahun yang tidak bersekolah berjumlah 6 juta sehingga hak anak-anak atas pendidikan dasar yang berkualitas belum terpenuhi.

Upaya menanggulangi masalah ini dan memenuhi kewajiban mereka, serta inti permasalahan anak yang tidak bersekolah, maka tantangan terbesar yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan mutu belajar-mengajar. Rendahnya hasil pendidikan dasar akan mengakibatkan timbulnya permasalahan yang lebih besar ditingkat skunder dan tertier, dan berdampak negatif terhadap tenaga kerja.

Pendidikan dasar di Indonesia terdiri dari 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan dasar dirancang untuk memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dasar bagi pendidikan selanjutnya. Selain rendahnya kemampuan membaca dan menulis, keterampilan hidup lainnya tidak diajarkan dengan baik. Hal ini termasuk komunikasi, pemecahan masalah dan penyelesaian masalah.

Diperkirakan apabila rendahnya kualitas belajar-mengajar dan kurangnya akses terhadap pendidikan dasar tidak terpecahkan sedini mungkin, maka angkatan kerja Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara tetangga. Dengan meningkatnya pasar global, maka dalam dasawarsa berikutnya akan ditandai dengan persaingan yang lebih ketat antar negara dan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi.

### 3.3.1 Permasalahan Pendidikan di Jawa Barat

#### 3.3.1.1 Kurangnya Akses Terhadap Pendidikan Dasar

Meskipun angka pendaftaran tinggi, namun ada sekitar 1,9 juta anak antara usia 7 hingga 12 tahun yang tidak bersekolah. Di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sekitar 4,2 juta atau 32% anak usia 13 hingga 15 tahun tidak bersekolah. Sementara 2 juta dari 10 juta anak yang seharusnya duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) masih berada di Sekolah Dasar (SD).

Masalah akses mempunyai tiga faktor penyebab dasar yaitu yang pertama tidak memadainya sistem pendaftaran, hal ini terbentur dengan terbatasnya jumlah ruang kelas dalam suatu sekolah sehingga dalam penerimaan murid cenderung dibatasi. Yang kedua adalah tidak memadainya sarana bagi anak dengan kebutuhan khusus, hal ini berkaitan dengan terbatasnya sekolah-sekolah khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) sehingga anak-anak yang memiliki kebutuhan pembelajaran khusus sulit mendapat akses untuk belajar. Faktor yang terakhir adalah kurangnya kesadaran di kalangan orang tua tentang kebutuhan akan pendidikan dasar, hal ini diakibatkan masih banyak para orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, mereka lebih memilih anaknya untuk bekerja membantu mereka dari pada bersekolah (Sumber: Dinas Pendidikan Jawa Barat).

#### 3.3.1.2 Pengelolaan pendidikan bersifat sentralistik

Keputusan banyak ditentukan dari pemerintah pusat sehingga sekolah-sekolah Kabupaten / Kota di Jawa Barat dan masyarakat sekitar sekolah kurang diberi tempat

dalam ikut serta membangun pendidikan. Dalam pengelolaan yang bersifat sentralistik, dalam pengambilan berbagai keputusan cenderung atas pertimbangan-pertimbangan pemerintah pusat. Padahal otonomi sekolah, dukungan orang tua dan masyarakat sangatlah penting dalam membangun sistem pendidikan kearah yang lebih mandiri.

Dalam pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik ini, anak didik condong dijadikan objek belajar yang mengakibatkan terisolasi dari lingkungan fisik dan sosialnya. Selain itu pengelolaan pendidikan menjunjung jiwa uniformitas, sehingga rasa kepemilikan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan menjadi amat rendah .

### 3.3.1.3 Kurangnya Perhatian Pada Output Pendidikan

Dalam proses pembelajaran, para tenaga pengajar (guru) tidak memfokuskan pada hasil (output) yang harus dicapai, namun hanya sekedar memenuhi target administratif sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) saja. Hal demikian akan mengakibatkan komponen input dan proses pembelajaran yang dilaksanakan kurang efektif, sehingga hasilnya tidak optimal karena murid hanya diajarkan dengan apa yang biasa diajarkan secara umum atau hanya melakukan pengajaran dengan cara-cara seperti mendikte murid (Sumber: Dinas Pendidikan Jawa Barat).

### 3.3.2 Upaya Pemerintah Provinsi Dalam Penanganan Masalah Pendidikan Dasar di Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi dan misi yang mengupayakan proses pencepatan (akselerasi) dalam pencapaian visi dan misi yang focus pada upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Upaya tersebut secara bertahap telah dimulai dengan kesungguhan dan kerjakeras Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama seluruh stakeholder yang ditandai dengan "Deklarasi Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun di Jawa Barat pada tahun 2004 silam.

Berbagai upaya telah dilakukan dengan memadukan segenap potensi sumber daya, peluang serta mengendalikan dan mengatasi kelemahan serta ancaman yang ada. Maka dalam Grand Design pembangunan sector pendidikan di Jawa Barat, pemerintah provinsi memiliki 5 program prioritas antara lain: program pendidikan anak usia dini (PAUD), program percepatan wajib beajar 9 (sembilan) tahun, program pendanaan rehabilitasi sekolah, program manajemen berbasis sekolah (MBS), serta program rintisan wajib belajar 12 (duabelas) tahun (Dinas Pendidikan JABAR,2008:i).

Selain itu, upaya lain yang dilakukan pemerntah provinsi Jawa Barat dalam menangani permasalahan-permasalahan pendidikan yang dihapainya adalah dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, baik pihak-pihak dalam negeri maupun pihak-pihak internasional untuk bersama-sama menjalankan program-

program yang akan diterapkan guna menigkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Barat, seperti salah satunya bekerjasama dengan UNICEF.

### 3.3.3 Program *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Penanganan Masalah Pendidikan Dasar di Jawa Barat

Dalam kerangka kerjasama antara pemerintah Indonesia dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) periode 2006-2010, telah disepakati 5 (lima) program kerjasama yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) yang kemudian akan dijalankan di sekitar 78 kabupaten di 15 provinsi yang salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Kerangka kerjasama yang dijalankan tersebut diantaranya:

1. Program Kesehatan dan Gizi;
2. Program Air dan Sanitasi Lingkungan;
3. Program Pendidikan;
4. Program Penanggulangan HIV/AIDS; dan
5. Program Perlindungan Anak.

Dalam upayanya membantu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) membantu menjalankan program-program dari pemerintah setempat dan juga memiliki program-program sendiri yang diusulkan untuk dilakukan kerjasama dalam penerapannya di Jawa Barat.

Program-program tersebut telah menetapkan visi dan strategi utama yang akan digunakan sebagai panduan bagi pelaksanaan program kerjasama UNICEF dan

Pemerintah Indonesia di Provinsi Jawa barat, yang kemudian dijalankan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat periode 2006-2010. Program-program kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan meningkatkan kesempatan seluruh anak-anak di Jawa Barat untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

#### 3.3.3.1 Program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);

Di Indonesia program ini baru dimulai sejak tahun 1999 sesaat setelah terjadinya krisis ekonomi dan pasca lengsernya era orde baru. Pengembangan program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan model untuk memberdayakan sekolah dasar melalui pelaksanaan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), dan Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam lingkungan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan.

Di Provinsi Jawa Barat sendiri, program MBS ini dijalankan dalam 2 (dua) fase. Fase pertama dilaksanakan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, dan fase kedua dilaksanakan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mendatang. Semenjak diterapkannya program MBS, perkembangan pendidikan dasar di Jawa Barat mengalami peningkatan.

Secara khusus program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personil pendidikan, anggota komite sekolah & tokoh masyarakat dalam hal Manejemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam urusan pendidikan untuk meningkatkan kinerja sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.

Kegiatan ini berlandaskan asumsi bahwa sekolah akan meningkat mutunya jika kepala sekolah, guru, dan masyarakat termasuk orang tua siswa diberikan kewenangan yang cukup besar untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk perencanaan dan pengelolaan keuangan sekolah, proses belajar mengajar menjadi aktif dan menarik, para pendidiknya lebih ditingkatkan kemampuannya dan masyarakat sekitar sekolah ikut aktif dalam urusan persekolahan secara umum (http://www.depdiknas.go.id/content.php?-content=file_mbs - Di unduh 04 oktober 2009).

Pada program MBS ini, sekolah memiliki otonom (kemandirian) untuk berbuat yang terbaik bagi sekolahnya. Ketergantungan pada tingkat pusat makin mengecil, sehingga sekolah harus dewasa dan meyakini bahwa perubahan pendidikan tidak akan terjadi jika sekolah sendiri tidak berubah. Tentu saja kemandirian ini menuntut kemampuan sekolah untuk mengatur dan mengurus sekolahnya menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (http://www.depdiknas.go.id/ content.php?-content=file_edupedia&id=20081027134949 - Di unduh 02 Januari 2010).

#### 3.3.3.2 Program Pendidikan Dasar Untuk Semua

Kegiatan pendidikan untuk semua difokuskan pada pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu, pelatihan tentang penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi masyarakat miskin serta pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikan. Selain berbagai kegiatan praktis tersebut, kegiatan juga

dilakukan dalam rangka upaya advokasi untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu dan murah.

Beasiswa umumnya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai namun dalam bentuk kebutuhan pendidikan seperti alat tulis, buku, pakaian sekolah, dan uang sekolah yang dibayarkan langsung ke lembaga penyelenggara pendidikan yang diikuti. Sejalan dengan pemberian beasiswa telah pula dikembangkan kegiatan-kegiatan kelompok di tingkat masyarakat termasuk kegiatan forum masyarakat untuk pendidikan, kelompok belajar anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan keaksaraan fungsional.

Selain daripada itu, program pendidikan dasar untuk semua ini juga mencakup kesetaraan gender di tingkat pendidikan dasar. Dimana, rata-rata jumlah siswa di tingkat SD maupun SLTP sangat di dominasi oleh siswa laki-laki dan minim siswa perempuan. Hal tersebut dikarenakan di Jawa Barat, masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa anak perempuan cukup belajar memasak untuk bekal dimasa depannya tanpa harus mendapat pendidikan.

UNICEF secara khusus berupaya untuk memberi kesempatan belajar yang sejajar bagi anak perempuan dan laki-laki. Melalui program ini, UNICEF mencoba untuk menyingkirkan kendala-kendala yang menghalangi anak perempuan untuk bersekolah dan lulus dari pendidikannya. UNICEF berupaya meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi anak perempuan dan laki-laki. Selain itu, UNICEF berupaya mendesak pemerintah untuk lebih memberi perhatian untuk kesetaraan gender dalam pendidikan (Sumber: UNICEF Indonesia).

### 3.3.3.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Usia dini merupakan masa kritis yang keberhasilanya sangat menentukan kualitas anak dimasa dewasanya (Anak Ideal). Kebutuhan tumbuh kembang anak yang mencakup gizi, kesehatan, dan pendidikan, harus merupakan satu kesatuan intervensi yang terintegrasi dan utuh. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa lebih dari 50 % perkembangan kecerdasan anak terjadi pada usia 0 - 6 tahun. Bila anak diterlantarkan (kurang asupan gizi, perlindungan kesehatan dan stimulasi pendidikan) perkembangan kecerdasanya tidak optimal.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal (http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_anak_usia_dini - Di unduh 28 Maret 2010).

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Pendidikan bagi anak-anak bisa dilaksanakan melalui program perawatan dan bagi anak usia dini (1-6 tahun) yaitu program Taman Kanak-kanak (TK), kelompok bermain (play group), dan Taman Penitipan Anak (TPA).

Namun, sebagian besar anak usia pra-sekolah di Jawa Barat kebanyakan tidak memiliki akses pada aktifitas pengembangan dan pembelajaran dini, dan kesiapan anak-anak untuk sekolah sangat terbatas. Hanya 18 persen anak usia 3-4 tahun di perkotaan dan 9 persen di pedesaan yang masuk kelompok bermain dan 45 persen anak usia 5-6 tahun perkotaan dan 24 persen di pedesaan masuk taman kanak-kanak.